

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Amerika Serikat dikenal sebagai salah satu negara yang menguasai berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, militer dan sebagainya. Pada awal abad ke 20, Amerika Serikat muncul sebagai negara dengan kekuatan industri yang unggul didukung dengan ledakan jumlah wirausahawan di bagian Utara dan kedatangan jutaan pekerja imigran serta petani yang berasal dari Eropa. Amerika Serikat terkenal dengan kekuatan militer yang mendominasi, terbukti dengan keterlibatannya pada Perang Dunia I melawan Jerman bahkan mendanai sekutu hingga meraih kemenangan. Pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Uni Soviet muncul sebagai negara adidaya yang saling bersaing dan berperang baik secara langsung melalui pertempuran senjata maupun secara tidak langsung melalui perang urat syaraf. Pembendungan kekuatan komunisme menjadi sasaran utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama berlangsungnya Perang Dingin tersebut. Keberhasilan dalam menyebarkan paham liberalisme dan bubarnya Uni Soviet menjadikan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adikuasa sekaligus membuktikan bahwa kekuatan militer Amerika Serikat sangat kuat.

Berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia juga ikut mengubah arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dengan mengedepankan posisi Amerika Serikat sebagai polisi dunia. Selain itu, Amerika Serikat mulai melirik Timur Tengah sebagai sasaran dalam menerapkan kebijakan luar negeri karena Amerika Serikat mengincar miliaran barel minyak yang berasal dari negara-negara di Timur Tengah. Namun respons negara-negara di Timur Tengah tidak peduli terhadap Amerika Serikat karena dianggap Amerika Serikat merupakan sekutu dari Israel. Untuk itu, demi menarik perhatian dari negara-negara di Timur Tengah, Amerika berinisiatif untuk membantu

menyelesaikan konflik-konflik yang ada disana dengan dukungan kekuatan militer Amerika Serikat yang sangat kuat tersebut. Dalam kurun waktu 1991-1992, Amerika Serikat telah menyelesaikan berbagai konflik, diantaranya melakukan tindakan represif pada tahun 1991 dengan mengusir pendudukan dan invasi ilegal pemerintahan Irak dibawah kuasa Saddam Hussein atas wilayah kedaulatan Kuwait. Lalu pada tahun 1992 melalui instruksi presiden Bill Clinton, Amerika Serikat mengirimkan tentara ke wilayah Bosnia yang dilanda krisis etnis. Sehingga menjadikan bukti keterlibatan Amerika Serikat dalam menangani konflik dan pertikaian yang terjadi wilayah atau negara-negara Timur Tengah.

Tragedi yang menimpa Amerika Serikat di tahun 2001 telah mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk melakukan peperangan terhadap terorisme atau *War On Terrorism* (WOT) yang diwujudkan dalam bentuk kampanye sebagai respon dari tragedi yang menimpa *World Trade Center* (WTC) akibat pesawat Al-Qaeda yang ditabrakkan dengan sengaja ke WTC dan markas Pentagon. WOT kemudian ditindaklanjuti sebagai serangkaian operasi perdamaian termasuk deklarasi perang terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan serta Irak yang dianggap mendukung Al-Qaeda. WOT dapat dianalisa melalui perspektif hukum internasional menyangkut dua masalah, yakni berkaitan dengan hukum kemanusiaan internasional pada konteks WOT dan peraturan terorisme tersebut digambarkan pada *Geneva Convention I-V 1949* dan *Additional Protocol I-II 1977*. Amerika Serikat menggunakan hukum kemanusiaan internasional untuk melegalkan agresi Afghanistan atas nama perang melawan tindak terorisme. (Intan Innayatun Soeparna S.H., "*Global War On Terror*" Oleh Amerika Dalam Perspektif Hukum Internasional)

Tragedi yang terjadi pada Amerika Serikat tanggal 11 September 2001 sangat membekas bagi Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara aman terhadap teror (*homeland security*) masih bisa kecolongan. Gedung WTC yang terletak tepat di jantung kota New York sekaligus pusat ekonomi

Amerika dapat diporak-porandakan dengan begitu mudah oleh jaringan teroris pimpinan Osama Bin Laden dari Afghanistan. Hal tersebut menjadi tamparan keras bagi Amerika Serikat dalam menjaga pertahanan dan keamanan negaranya sekaligus menandakan bahwa negara lemah seperti Afghanistan mampu memberikan ancaman besar bagi negara sekuat Amerika Serikat. Oleh karena itu, Presiden Amerika Serikat, George W. Bush kemudian menyatakan perang terhadap terorisme atau WOT dan dituangkan dalam *National Security Strategy* (NSS) tahun 2002. Isi di dalam NSS tersebut berkaitan dengan tekad Amerika Serikat dalam memerangi tindak terorisme dalam bentuk apapun. Amerika Serikat menerapkan WOT dan perlawanan terhadap jaringan teroris di seluruh dunia mulai dari kawasan Amerika Utara dan Selatan, Asia, Afrika, Eropa tanpa terkecuali negara-negara di kawasan Timur Tengah (House, *The National Security Strategy of The United States of America*, 2002, p. 5).

Kebijakan WOT yang tertuang dalam NSS 2002 dapat disimpulkan atas tujuan Amerika Serikat menghadapi tindak terorisme dalam upaya penyerangan, perlawanan, dan pembungkaman kelompok-kelompok teroris serta negara manapun yang mengindikasikan adanya bentuk tindakan terorisme, terlebih kepada negara-negara yang memiliki maupun sedang mengembangkan senjata pemusnah massal (*Weapon Mass Destruction*). Amerika Serikat akan menindak tegas negara-negara tersebut melalui jalur militer demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penempatan pasukan dilakukan di berbagai negara Timur Tengah yang menjadi tempat perkembangan teroris seperti Irak dan Afghanistan. Selain itu juga dilakukan melalui jalur diplomasi langsung kepada negara-negara yang diduga menjadi tempat perkembangan teroris serta meningkatkan dan memperkuat hubungan aliansi maupun kerjasama dengan tiap-tiap negara untuk menekankan bahwa saat ini dunia Internasional sedang tidak baik-baik saja dan perang melawan terorisme dalam bentuk apapun sangatlah penting. (Idem, p. 12) Dan kampanye terhadap WOT menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak

hanya sebatas mengibarkan perang melawan terorisme tetapi juga memperbaiki dan meningkatkan pergerakan yang baik dibawah arus pemerintahan yang sah. Selain itu, Amerika Serikat menegaskan untuk melawan terorisme di Afghanistan akan bekerja sama bersama organisasi Internasional seperti *United Nations* (UN) sebagai *Non-Governmental Organizations* (NGO) dan negara lainnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan, politik, ekonomi dan keamanan yang diperlukan guna membangun kembali Afghanistan sehingga tidak akan ada lagi menyakiti warga, memberikan ancaman bagi negara tetangga dan perlindungan terhadap teroris. (Idem, p. 13)

Pasca tragedi 9/11 Maka dari itu, dibawah pimpinan George W. Bush memposisikan dirinya sebagai negara yang diserang dan menganggap perlu melakukan pembelaan diri dengan melakukan penyerangan balik ke Afghanistan yang merupakan markas milisi Taliban dimana Taliban dan Al-Qaeda dengan pemimpin Osama Bin Laden berafiliasi membentuk kekuatan bersama. Osama Bin Laden menjadi tujuan utama bagi Amerika Serikat. Presiden George W. Bush meminta kepada Afghanistan (dikuasai rezim Taliban) untuk menyerahkan Osama Bin Laden yang diduga masih menetap di Afghanistan. Namun Taliban justru menolaknya dan mengatakan bahwa Osama Bin Laden tidak akan diserahkan melainkan menawarkan usulan agar Osama Bin Laden diadili oleh Mahkamah Islam. Oleh karena itu, Amerika Serikat bersama sekutunya sepakat melakukan penyerangan terhadap Afghanistan sekitar tanggal 7 Oktober 2001. Setelah berhasil meringkus Osama Bin Laden dengan strategi penyerangan militer lewat udara, ternyata Amerika Serikat masih meninggalkan beberapa pasukan militernya di *camp-camp* untuk mewaspadaai apabila terjadi serangan balik. Tidak hanya di Afghanistan, Amerika Serikat juga mengirimkan pasukan militernya di beberapa negara Timur Tengah yang diakibatkan oleh teroris Taliban dan Al-Qaeda seperti membangun *camp* tahanan di markas militer Guantanamo di Kuba dengan total

lebih dari 1000 orang terduga teroris Taliban dan Al-Qaeda. (Kronik Perkembangan Amerika Serikat Pasca 9/11, 2009)

Dari semua negara di Timur Tengah, ada dua negara yang disorot terkait tindak terorisme, yakni Irak dan Afghanistan. Namun, Afghanistan muncul sebagai negara yang dinilai sebagai pemantik tidakan terorisme di dunia yang diawali banyaknya tindak pemberontakan yang dilakukan rezim Taliban atas pemerintah Afghanistan sendiri. Terlebih dengan perkembangan jaringan Al-Qaeda yang menyebabkan Amerika Serikat perlu turun tangan langsung menyelesaikan konflik disana. Bahkan, peperangan itu menjadi peperangan terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat melawan teroris. Tercatat, kurang lebih sebanyak 23.000 pasukan militer Amerika Serikat diterjunkan di Afghanistan guna menangani konflik dan peperangan melawan teroris yang berkembang pesat disana. Sampai tahun 2004 pada masa kepemimpinan presiden Afghanistan Hamid Karzai yang mulai menjabat pada 7 September 2004, pasukan militer Amerika Serikat yang tersisa di Afghanistan kurang lebih sebanyak 10.000 pasukan karena gugur dalam peperangan melawan Taliban dan Al-Qaeda. Petualangan Amerika Serikat di Afghanistan berlangsung sudah lebih dari delapan tahun semenjak keputusannya menyerbu negara itu.

Penerapan kebijakan yang dilakukan pada masa pemerintahan presiden George W. Bush memiliki perbedaan dengan penerapan kebijakan yang dilakukan oleh presiden Obama. Walau memang pasca dilakukan pergantian kepemimpinan dari Bush ke Obama tahun 2009, secara otomatis Obama mewarisi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan pada masa kepemimpinan Bush, salah satunya yaitu mengenai tindak perlawanan terhadap terorisme. Apabila presiden George W. Bush lebih menekankan pada pengiriman ribuan pasukan ke luar negeri untuk melakukan operasi militer besar-besaran dalam memburu pelaku terorisme yang diarahkan ke negara yang dianggap melindungi teroris seperti Afghanistan, dan Irak. Kebijakan tersebut lebih dikenal dengan sebutan Doktrin Bush, yaitu fondasi dalam

menanggulangi terorisme dengan konsep (*preemptive war*) sebutan untuk menangani sebuah ancaman sebelum ancaman yang sesungguhnya datang (*imminent threat*) meliputi ancaman terorisme, kepemilikan WMD dan kehadiran negara-negara berandal atau pemberontak. Oleh sebab itu, kebijakan Bush merujuk pada penghalalan segala bentuk kekuatan militer untuk menghalau perkembangan ancaman diatas. Bush secara terang-terangan menyatakan peperangan atau *global war on terror* dengan penekanan dominasi militer Amerika Serikat dari dalam maupun luar negeri daripada upaya melumpuhkan tindak terorisme itu sendiri. (Wardoyo, 2015)

Adanya perubahan arah kebijakan Amerika Serikat dalam bidang militer dan keamanan Internasional masa Obama ditunjukkan lewat panduan implementasi baru yang dirangkum dalam "*Memorandum for the Principals*" oleh *National Security Advisor*. Dalam hal tersebut berisi mengenai strategi yang akan diterapkan di Afghanistan hasil dari rangkuman opsi Afghanistan yang dibahas bersama dengan presiden Obama untuk mengirimkan pasukan tambahan Amerika Serikat yang signifikan di awal tahun 2010 guna menurunkan Taliban dan menetapkan syarat untuk membantu percepatan transisi otoritas Afghanistan yang akan dimulai pada bulan Juli 2011. Selain itu, menekankan tujuan Amerika Serikat di Afghanistan adalah untuk menolak tempat perlindungan atau dalam bentuk apapun itu bagi Al-Qaeda dan untuk mengatasi pemberontakan Taliban dalam menggulingkan pemerintah Afghanistan. Implementasi baru ini untuk Amerika Serikat bersama dengan mitra internasional dan Afghanistan untuk mengamankan Afghanistan dan diharapkan mampu mengurangi konflik serta ketegangan yang terjadi disana. Dengan hal tersebut harapannya penyelesaian konflik di Afghanistan dapat segera teratasi dan Obama dapat mulai melakukan penarikan ribuan pasukan militer tersebut secara berkala tahun 2011. (Woodward, 2010, p. 125)

Namun begitu yang terjadi tak semulus yang direncanakan, Obama justru menambah pasukan ke Afghanistan awal Desember 2009, Obama telah

memerintahkan pengiriman prajurit tambahan sebanyak 30.000 ke Afghanistan untuk bergabung dengan pasukan Amerika Serikat yang lebih dahulu berada di negara itu untuk memerangi Taliban dan sekutunya. Disaat sekutu Amerika Serikat lainnya mulai membatasi pengiriman pasukan ke luar negeri karena penempatan pasukan militer ke luar negeri dinilai sudah bukan lagi sebatas konteks operasi militer namun mulai memasuki ranah politik, Amerika Serikat justru menambah jumlah pengiriman pasukan militernya ke Afghanistan hasil relokasi pasukan militer dari Irak untuk ditempatkan di Afghnaistan dengan alih sebagai pemenuhan janji Obama untuk menarik pasukannya di Irak dan mengalihkannya ke Afghanistan dari sudut pandang prioritas. Kebijakan militer era Obama menunjukkan perbedaan sikap yang cenderung lebih tenang dan siap untuk melakukan serangan sementara negara lain seperti Jerman memilih untuk melakukan kebijakan yang sebaliknya yaitu dengan melakukan pembatasan pengiriman pasukan militer ke luar negeri. Pengiriman pasukan militer ke Afghanistan masih rutin dilakukan oleh Obama mulai tahun pertama dia menjabat sebagai presiden Amerika Serikat ke 44 tahun 2009 hingga memasuki tahun 2011. Namun terlepas dari penambahan pengiriman pasukan militer di Afghanistan, presiden Obama juga merencanakan penarikan pasukan militer dari tahun 2011-2014 seiring dengan pergantian presiden baru Ashraf Ghani tahun 2014. Rencana kebijakan presiden Obama untuk melakukan penarikan pasukan militer di Afghanistan sendiri masih menuai respon pro dan kontra dari berbagai pihak seperti kongres, pejabat militer, senator, partai politik dan masyarakat di Amerika Serikat. Ada pihak yang menginginkan penarikan pasukan, namun ada juga yang menghendaki adanya penambahan pasukan di Afghanistan.

Terjadi polemik antara Obama dengan Partai Demokrat dan publik Amerika Serikat yang menentang keputusan penambahan militer dengan alasan pendekatan militer bukan solusi yang cepat untuk menciptakan stabilitas politik serta alasan mengenai anggaran besar yang harus dikeluarkan untuk

melaksanakan rencana tersebut. Padahal mulanya Obama mendapat dukungan penuh untuk melakukan misi perdamaian ke Afghanistan dan memerangi terorisme. Tetapi setelah belasan tahun perang ini berlangsung, publik Amerika Serikat mulai menyuarakan agar menghentikan peperangan karena banyak pasukan militer Amerika Serikat yang gugur dalam melaksanakan misi perdamaian di Afghanistan dan keterlibatan Amerika Serikat dalam menangani konflik di Afghanistan sudah tidak efektif. (Kristanti, 2014) Menanggapi respons internal Amerika Serikat terkait permohonan penarikan pasukan militer di luar negeri, muncul isu bahwa Amerika Serikat dan sekutu akan menarik pasukannya di Afghanistan pada tahun 2012 secara bertahap hingga akhir 2014 dimana presiden Amerika Serikat Barack Obama berencana menisakan 9.800 tentara di Afghanistan kemudian jumlah itu akan berkurang setengah pada akhir 2015. Tetapi kenyataan yang justru presiden Obama menarik rencana penarikan pasukan dan menundanya hingga akhir 2016 di Afghanistan dengan sudah tidak ada lagi tentara Amerika Serikat yang melakukan misi WOT melainkan sebagai keamanan kedutaan besar Amerika Serikat di Afghanistan. (Indonesia, 2015)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan pada skripsi ini yaitu: *“Mengapa Amerika Serikat melakukan penangguhan penarikan pasukan militer AS di Afghanistan tahun 2014-2016?”*

## **C. Landasan Teoritik**

Teori didasarkan pada kenyataan sekaligus dijadikan sebagai acuan dalam membentuk kenyataan karena teori memberikan umpan balik pada pembuatan sejarah yang dipengaruhi oleh sebagaimana orang-orang yang membuat sejarah untuk memahami apa yang mereka lakukan. (Linklater, 1996) Untuk memahami dan menganalisa kebijakan Amerika Serikat dalam penangguhan penarikan pasukan militer di



Afghanistan tahun 2014-2016 penulis menggunakan teori sebagai berikut:

### **Teori Pembuatan Putusan Luar Negeri**

Teori ini dirumuskan oleh William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul "*Introduction of International Politics : Model of Decision Making Process*", berisi tentang bagaimana mengidentifikasi proses pembuatan kebijakan Amerika Serikat yang kemudian dapat dirumuskan atas dasar pertimbangan tiga sektor. Pertama adalah pengambilan kebijakan Amerika Serikat didasarkan pada situasi politik dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Faktor yang kedua, berdasarkan pada kondisi ekonomi dan militer yang Amerika Serikat miliki. Dan faktor ketiga adalah konteks yang bersifat Internasional dan Amerika Serikat perlu mengambil kebijakan dan tindakan. William D. Coplin menjelaskan bahwa tiga faktor yang memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri tersebut merupakan refleksi diri bagi sebuah negara sebagai modal dalam mengambil sebuah kebijakan luar negeri. Selain itu, faktor-faktor tersebut menjadi alasan kuat bagi negara untuk ikut mengambil tindakan melalui kebijakan luar negeri, bukan semata-mata hanya untuk mencapai tujuan nasional.

a. Kondisi politik dalam negeri / politik domestik.

Menurut Coplin, situasi politik dalam negeri adalah penggambaran hal-hal yang bisa dijadikan patokan suatu negara dalam politik luar negerinya. Banyak hal yang terjadi di situasi politik domestik yang memengaruhi alur kebijakan politik luar negeri, sebagai contohnya seperti pengaruh kepribadian aktor karena Coplin menjelaskan lebih jauh terkait politik luar negeri tak terlepas dari peran aktor-aktor politik dalam negeri dari proses pembuatan putusan politik luar negeri suatu negara. Dan dalam hal pembuatan

putusan, aktor yang dapat memengaruhi kebijakan politik luar negeri (*policy influencer*) seperti birokrat, partai, dan massa.

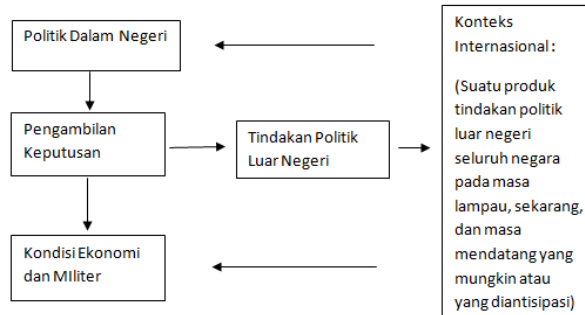
b. Situasi ekonomi dan militer domestik

Kondisi ekonomi dan militer yang menjadi dasar kekuatan negara untuk mampu menopang kebijakan luar negeri yang akan ditetapkan oleh negara tersebut. Dalam hal ini, faktor geografis, tingkat pendapatan negara, tingkat kekuatan militer termasuk faktor geografis ikut menjadi dasar pertimbangan pertahanan dan keamanan suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Berdasarkan penjelasan Coplin, tingkat kemampuan ekonomi dan militer dalam negeri suatu negara sangat berpengaruh besar terhadap proses pembuatan putusan luar negeri suatu negara dalam tatanan global.

c. Konteks Internasional

Konteks Internasional yakni hal-hal yang berasal diluar apa yang terjadi di dalam negeri namun ikut memengaruhi kondisi suatu negara sehingga menyebabkan negara perlu ikut andil dalam mengatasinya lewat pembuatan kebijakan. Ada beberapa hal penting yang biasanya berdampak pada konteks Internasional sehingga mendasari negara membuat kebijakan luar negeri, antara lain geografis, ekonomis, dan politis dari dunia Internasional. Konteks Internasional bersinggungan langsung dengan negara-negara yang saling berhubungan baik secara ekonomi maupun politik sehingga memungkinkan negara untuk ikut mengambil tindakan, atau bisa dikatakan lingkungan Internasional memaksa negara ikut bertindak langsung karena bersinggungan dengan negara tersebut. (D.Coplin, 2003, pp. 165-172)

**Gambar 1.1 Model Pengambilan Putusan Politik Luar Negeri William D. Coplin**



Sumber : William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis Edisi Kedua (Coplin & Marbut, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah Teoritis, 2003, hal. 30).

Dari model pengambilan putusan politik luar negeri dari William D. Coplin diatas, penulis akan mencoba menginterpretasikan dengan pengambilan kebijakan Amerika Serikat dalam penanggulangan penarikan pasukan militern di Afganistan tahun 2014-2016.

Dalam pengambilan kebijakan politik luar negeri, Amerika Serikat mempertimbangkan situasi domestik sebagai determinan pertama karena juga berkaitan dengan pengambilan kebijakan luar negeri. Situasi politik domestik Amerika Serikat ini ikut menentukan langkah pembuat kebijakan dalam merumuskan politik luar negeri Amerika Serikat. Aktor yang berperan sebagai *policy influencer* dalam tiap kebijakan Amerika Serikat adalah kongres, senat, partai demokrat yang mengusung Obama sebagai kandidat presiden dan juga publik Amerika Serikat. Adanya pro dan kontra dari pihak diatas menjadi dasar pertimbangan Obama dalam

kebijakan terkait pengiriman pasukan ke luar negeri, seperti Afghanistan. Kemudian di satu sisi, ternyata suara publik Amerika Serikat juga berpengaruh pada tindak lanjut kebijakan Obama karena menentang pengiriman pasukan dan meminta agar pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan segera ditarik. Ditambah ada desakan dari Partai Demokrat yang menentang keputusan Obama dengan alasan bahwa pendekatan militer bukan solusi yang cepat untuk menciptakan stabilitas politik serta alasan tentang anggaran besar yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan rencana tersebut.

Faktor selanjutnya sebagai determinan kedua dalam mempertimbangkan pengambilan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat adalah kondisi ekonomi dan militer Amerika Serikat. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Dunia I maupun II menjadi bukti kuatnya militer Amerika Serikat. Kemantapan Amerika Serikat untuk melibatkan diri dalam menyelesaikan konflik di banyak negara di Timur Tengah, termasuk Afghanistan tentu membutuhkan anggaran dan kesiapan militer. Upaya yang dilakukan Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik dilakukan dengan pengiriman ribuan pasukan militer, bantuan peralatan pertahanan dan teknologi militer bagi pasukan lokal. Untuk itu, dapat dipastikan Amerika Serikat mengalokasikan anggaran yang besar bidang militer untuk misi perdamaian dunia.

Perlu disadari bahwa konteks internasional memerankan posisi penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Afghanistan. Konteks internasional dilatarbelakangi oleh beberapa hal, dimana pada kasus ini determinan konteks internasional yang digunakan adalah geografis dan politis. Kondisi geografis di Afghanistan yang sedang dilanda peperangan selama bertahun-tahun dan memakan setidaknya ribuan korban tanpa memandang

apakah warga sipi, pejabat pemerintahan maupun pasukan luar negeri menjadi pertimbangan Amerika Serikat dalam memutuskan kebijakan luar negeri di Afghanistan, terutama dalam hal pengiriman pasukan militer. Secara politis, faktor konteks internasional ikut dipengaruhi oleh adanya pergantian rezim pemerintahan di Afghanistan dari pemerintahan Hamid Karzai ke pemerintahan Ashraf Ghani tahun 2014 yang terus meminta dilakukan pertemuan dengan presiden Amerika Serikat, Barack Obama untuk membahas dari isu keamanan internal Afghanistan hingga pembahasan kelanjutan penempatan pasukan Amerika Serikat di Afghanistan setelah tahun 2014. Fakta tersebut menjadi konsideran ketiga Amerika Serikat dalam melakukan penangguhan pasukan militer Amerika Serikat di Afghanistan tahun 2014-2016.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teoritik yang sudah dijelaskan, maka penulis dalam menarik sebuah hipotesa dari penelitian bahwa **Amerika Serikat melakukan penangguhan penarikan pasukan militer di Afghanistan tahun 2014-2016 karena**

1. Kondisi di Afghanistan yang masih mengalami krisis keamanan dan menjatuhkan ribuan korban sehingga masih membutuhkan militer Amerika Serikat di Afghanistan.
2. Adanya pengaruh dari presiden Afghanistan Ashraf Ghani dalam pembahasan perjanjian keamanan dan pengiriman pasukan dengan presiden Obama.

#### **E. Metode Penulisan**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang

memiliki fokus pada suatu proses dan peristiwa tertentu secara interaktif dan ditambahkan unit analisa menggunakan model atau pendekatan terhadap studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek dalam suatu penelitian guna menghasilkan pemaparan fakta yang lebih empiris dan aktual.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian kualitatif adalah metode dimana data yang dikumpulkan untuk melengkapi pernyataan didalam skripsi ini menggunakan kalimat yang tersusun dalam frasa dan bukan menunjukkan kalkulasi data berupa angka. Sehingga dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni pemanfaatan karya buku secara tertulis maupun *e-book*. Dalam penelitian kepustakaan mengumpulkan data menggunakan metode literatur dari berbagai sumber, seperti buku-buku, makalah ilmiah, jurnal, koran, majalah, artikel dan sumber lainnya yang dianggap relevan dan berkaitan dengan pokok bahasan skripsi.

## **3. Teknik Analisa**

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang didasarkan pada kajian deskriptif analitif. Sehingga data yang diperoleh kemudian akan dianalisa dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan.

## **F. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian skripsi dengan judul “Kebijakan Amerika Serikat Dalam Penanggulangan Penarikan Pasukan Militer di Afghanistan Tahun 2014-2016”

1. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengambilan kebijakan politik luar negeri dalam mengirimkan pasukan militer di Afghanistan.
2. Untuk mengetahui alasan Amerika Serikat melakukan penanggulangan pasukan militer di Afghanistan tahun 2014-2016.

### **G. Batasan Penelitian**

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan dalam skripsi ini dengan judul “Kebijakan Amerika Serikat Dalam Penanggulangan Pasukan Militer di Afghanistan Tahun 2014-2016”, maka penulis memberikan batasan pembahasan pada tahun 2014-2016. Dalam kurun waktu tersebut pada tahun 2014 menjadi tahun dimana Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Barack Obama mulai menyetujui adanya penanggulangan penarikan pasukan militer AS di Afghanistan namun. Sementara pada tahun 2016, diharapkan sudah tidak ada lagi operasi militer AS di Afghanistan.

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membagi penjabaran menjadi beberapa bab yang saling memiliki keterkaitan. Berikut adalah perumusan 5 (lima) bab dalam karya skripsi ini:

**BAB I** merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teoritik, hipotesa, metode penulisan, tujuan penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** berisi pembahasan mengenai dinamika politik luar negeri Amerika Serikat dan perubahan kebijakan Amerika Serikat ke arah perlawanan terhadap terorisme dengan melakukan kampanye WOT. Penulis akan menjabarkan secara umum politik luar negeri Amerika Serikat dan perubahan arah kebijakan luar negerinya yang fokus pada tindak terorisme. Kebijakan tersebut memiliki keterkaitan dengan kampanye WOT yang dilakukan dengan mengirim pasukan luar negeri.

**BAB III** membicarakan perubahan kebijakan pengiriman pasukan militer ke luar negeri yang dicurigai sebagai ladang terorisme, termasuk negara-negara Timur Tengah seperti Irak dan Afghanistan. Penulis akan menjabarkan skala kekuatan Amerika Serikat dalam operasi militer dan perubahan kebijakan menjadi penarikan pasukan militer Amerika Serikat di luar negeri dalam WOT pada masa presiden Obama.

**BAB IV** membahas tentang poin-poin yang tertera dalam hipotesa pada penelitian ini. Penulis akan menjabarkan kebijakan Amerika Serikat menanggihkan penarikan pasukan dan faktor konteks internasional sebagai determinan yang menjadi alasan Amerika Serikat melakukan penanggihan pasukan militer di Afghanistan tahun 2014-2016.

**BAB V** Merupakan bab penutup dan kesimpulan dari keseluruhan bab yang telah dijabarkan sebelumnya. Berisi mengenai ringkasan singkat, rinci dan jelas mengenai penelitian yang disusun penulis.